

## KRISIS POLITIK MYANMAR DAN INTERVENSI ASEAN

7

Sita Hidriyah

### Abstrak

*Myanmar masih mengalami situasi politik yang tidak menentu. Pemberlakuan keadaan darurat oleh pihak militer selama setahun memaksa rakyat untuk melakukan unjuk rasa agar demokrasi dapat ditegakkan. Tulisan ini membahas intervensi seperti apa yang bisa dilakukan ASEAN, dan juga masyarakat internasional, termasuk PBB, dalam mencari solusi atas krisis politik yang terjadi di Myanmar. Dalam menyikapi krisis politik di Myanmar tersebut, ASEAN tidak bisa keluar dari prinsip yang tertera dalam Piagam ASEAN. Salah satu prinsip yang kerap dikemukakan adalah prinsip non-intervensi. Ini artinya, tidak mudah bagi ASEAN untuk melakukan intervensi dalam mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar. Ketika intervensi ASEAN tidak berjalan efektif, maka solusi alternatif untuk menangani krisis Myanmar bisa saja melibatkan masyarakat internasional yang lebih luas, termasuk PBB. Melalui PBB, dengan perangkat dan otoritas kuat yang dimilikinya, badan dunia tersebut dapat menekan rezim junta militer jika dianggap tidak kooperatif dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.*

### Pendahuluan

Solusi bagi penyelesaian krisis politik yang terjadi di Myanmar, sejak penggulingan pemerintahan sipil yang terpilih pada 1 Februari 2021, belum menemukan titik terang. Sikap junta militer yang bersikukuh memegang kekuasaan dan tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap para aksi protes anti-kudeta Myanmar telah menimbulkan keprihatinan internasional. Sejak kudeta militer 1 Februari, jumlah kematian dari

para pengunjuk rasa anti-kudeta militer Myanmar hingga 19 Maret 2021 telah mencapai 231 orang (Kompas.com., 20 Maret 2021). Jumlah korban dari massa pro-demokrasi yang menentang junta militer diperkirakan meningkat dan melebihi jumlah itu, pasalnya pasukan keamanan masih saja melakukan tindakan kekerasan, termasuk melakukan penembakan, terhadap massa anti-kudeta.

Krisis politik yang terjadi di Myanmar, dan terutama tindakan



kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap massa pro-demokrasi, telah memicu kecaman internasional. Para pemimpin dunia mengutuk keras tindakan mematikan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap aksi damai demonstran anti-kudeta. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan, penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima (Republika, 22 Maret 2021). Sejumlah negara Barat pun kemudian menjatuhkan sanksi, karena tindakan junta militer terhadap massa pro-demokrasi dianggap telah melampaui batas kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip HAM universal. Uni Eropa, bahkan, akan menjatuhkan sanksi kepada 11 petinggi militer Myanmar yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap massa anti-kudeta (cnbcindonesia.com, 23 Maret 2021).

Krisis politik yang terjadi di Myanmar sudah tentu juga menjadi *concern* ASEAN, setidaknya hal ini tercermin dalam pertemuan informal menlu ASEAN pada awal Maret. Saat itu Menlu RI Retno Marsudi mengungkapkan bahwa semua anggota ASEAN wajib menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang tertera di dalam Piagam ASEAN secara utuh, seperti *non-interference*. Namun demikian, pada saat yang sama, menghormati dan menjalankan prinsip dan nilai lain dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, *good governance*, supremasi hukum, dan *constitutional government* adalah sama pentingnya. Tulisan ini membahas tentang intervensi seperti

apa yang bisa dilakukan ASEAN, dan juga masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam mencari solusi atas krisis politik yang terjadi di Myanmar.

### **Intervensi ASEAN: Sangat Terbatas**

Dalam menyikapi krisis politik yang terjadi di Myanmar, ASEAN, sepertinya, tidak bisa keluar dari prinsip dan nilai-nilai yang tertera dalam Piagam ASEAN. Salah satu prinsip yang kerap dikemukakan ketika terjadi krisis politik yang terjadi di salah satu negara anggota ASEAN, sebagaimana sudah dikemukakan di atas, adalah prinsip *non-interference* (non-intervensi). Ini artinya, krisis politik yang terjadi di salah satu negara ASEAN menjadi urusan dalam negeri negara yang bersangkutan, dan oleh karenanya intervensi dari negara anggota ASEAN yang lain tidak bisa dibenarkan. Intervensi di sini lebih diartikan sebagai ikut campur mengurus urusan dalam negeri negara lain, tanpa diminta oleh negara yang sedang menghadapi krisis, karena ada kepentingan tertentu yang melatarbelakanginya.

Bagaimana dengan konteks krisis politik yang terjadi di Myanmar saat ini, yang ternyata telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, bahkan dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas kawasan. Intervensi seperti apa yang bisa dilakukan ASEAN, sebagai perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, yang sudah seharusnya juga menaruh perhatian pada upaya terwujudnya perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN memang tidak bisa

mengintervensi langsung untuk memulihkan situasi Myanmar, tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi ASEAN untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas krisis yang terjadi di Myanmar. ASEAN harus bisa masuk dengan mempromosikan prinsip-prinsip lain yang tertuang dalam Piagam ASEAN ke dalam kehidupan politik Myanmar, seperti demokrasi, penghormatan terhadap HAM, dan *good governance*. Intervensi ASEAN semacam itu belum tentu bisa langsung diterima terutama ketika elemen-elemen militer masih ingin tetap eksis dan mendominasi dalam kehidupan politik Myanmar.

ASEAN harus dapat bersikap lebih lunak untuk dapat mengintervensi serta memberikan tekanan melalui sikap tegas seperti ancaman mengeluarkan Myanmar dari ASEAN apabila pemimpin militer tidak bersedia mengakhiri kudeta. Hal itu menjadi tantangan ASEAN, karena stabilitas di wilayah ASEAN akan semakin terganggu apabila penolakan terhadap rekonsiliasi tidak dapat dilakukan oleh jajaran militer atau angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw). Sebaliknya Myanmar, dengan junta militernya yang sedang berkuasa, diharapkan menghindari berbagai upaya yang dapat merusak atas cita-cita ASEAN dan menghormati negara-negara anggotanya demi kepentingan bersama.

Indonesia, sebagai negara demokrasi dan anggota ASEAN yang dianggap dapat memainkan peran dalam membantu Myanmar keluar dari krisis, sejauh ini memang telah berupaya membantu Myanmar, antara lain melalui program pemajuan demokrasi.

ASEAN, khususnya Indonesia, harus kembali menegaskan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan di Myanmar jika negara ini ingin menjadi bagian dari komunitas politik dan keamanan ASEAN, yang di dalamnya memuat keinginan masyarakat ASEAN untuk terus maju dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan dalam menciptakan stabilitas kawasan. ASEAN harus mendorong Myanmar untuk kembali ke pemerintahan sipil dan melakukan reformasi militer karena inilah jalan terbaik bagi Myanmar untuk berdamai. Solusi semacam itu diberikan berdasarkan pengalaman Indonesia, di mana militer tidak lagi terlibat dan menarik diri dari urusan politik, sehingga publik bisa menaruh harapan besar akan peran militer sebagai pelindung rakyat dan negara.

Kembali pada situasi Myanmar saat ini, tampaknya keinginan untuk mereformasi militer Myanmar tidaklah mudah, jika hal itu dikaitkan dengan sikap junta militer belakangan ini yang belum memperlihatkan keinginan untuk berekonsiliasi. Sebaliknya, junta militer semakin keras dan akan menuntut Aung San Suu Kyi dan kelompoknya di pengadilan, karena dianggap melakukan kecurangan dalam pemilu November 2020. Tindakan aparat keamanan Myanmar terhadap massa anti-kudeta yang semakin keras, bahkan mereka dianggap teroris, menunjukkan posisi junta militer yang sulit untuk diajak berdialog dengan masyarakat sipil pro-demokrasi. Memerhatikan situasi dan perkembangan demikian, tampaknya tidak mudah bagi

ASEAN untuk melakukan intervensi dalam kerangka mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar.

Situasi di atas juga menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi yang dilakukan negara anggota ASEAN belum memberikan perubahan bagi situasi di Myanmar. Kudeta militer dan kehidupan politik di Myanmar yang tidak memberi ruang tumbuh bagi penghormatan terhadap HAM dan demokrasi seakan memperlihatkan bahwa hal tersebut adalah masalah internal bagi Myanmar yang tidak perlu dicampuri oleh negara lain. Sementara, intervensi ASEAN pun terbatas sifatnya, dan bisa saja ASEAN saat ini menilai bahwa krisis yang terjadi di Myanmar belum memberi dampak signifikan terhadap stabilitas kawasan. Namun, jika memerhatikan keinginan ASEAN, terutama melalui pilar komunitas politik dan keamanannya, maka pengembangan kehidupan demokrasi dan perlindungan HAM di Myanmar harus terus disuarakan oleh ASEAN, bahkan didorong untuk bisa hadir secara nyata di Myanmar. Ketika intervensi ASEAN tidak berjalan efektif, maka solusi alternatif untuk menangani krisis Myanmar bisa saja melibatkan masyarakat internasional yang lebih luas, termasuk PBB.

### **Solusi Alternatif PBB**

Solusi atas krisis politik yang terjadi di Myanmar bukan tidak mungkin melibatkan masyarakat internasional yang lebih luas, termasuk PBB, karena isu kudeta militer dan kekerasan yang dialami masyarakat Myanmar memang telah menyita perhatian internasional. Kekerasan aparat

keamanan dalam menyikapi aksi massa pro-demokrasi di Myanmar, di era keterbukaan informasi saat ini, tidak bisa disembunyikan dari sorotan media internasional. Tidaklah mengherankan jika kemudian sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Kanada mengancam keras kekerasan aparat keamanan Myanmar terhadap aksi unjuk rasa damai massa pro-demorasi dan anti-kudeta di Myanmar. Begitu juga PBB, sangat menyesalkan situasi yang terjadi di Myanmar, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.

PBB, dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional, dan dengan perangkat ketentuan internasional yang dimilikinya, bisa saja melakukan intervensi konstruktif untuk mengambil peran dalam mengatasi krisis politik yang terjadi di Myanmar. Solusi alternatif pertama yang dapat dilakukan adalah mengajak Tatmadaw (Militer Myanmar) untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Melalui keterlibatan pihak internasional, termasuk ASEAN, rekonsiliasi perlu didorong melalui negosiasi antara pihak militer dengan pemimpin pemerintahan sipil berkenaan dengan peran dan tempat militer negara Myanmar secara demokratis.

Solusi alternatif kedua yang dapat dilakukan adalah membentuk pemerintahan bersifat sementara dengan pemimpin bukan dari militer ataupun sipil (bukan dari Tatmadaw atau partainya Aung San Suu Kyi/NLD). Pembentukan ini dengan catatan jika Tatmadaw setuju karena menolak mengembalikan

kekuasaan kepada sipil. Selain itu, pemerintahan ini hanya bertugas untuk menertibkan keadaan umum menjadi kembali stabil dan menyelenggarakan pemilu ulang yang bersifat adil serta jujur sehingga apapun hasilnya harus dapat saling menerima. Dengan adanya pemilu ulang ini, masyarakat internasional tentunya dapat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya proses pemilu. Solusi ketiga yang dapat disediakan adalah melakukan apa yang dikehendaki Tatmadaw yaitu pemilu ulang dalam jangka waktu satu tahun setelah pernyataan tidak sah dari hasil pemilu November 2020.

Solusi-solusi yang dijelaskan tadi memang masih dikhawatirkan ditolak, sehingga unjuk rasa anti-kudeta dan aksi kekerasan aparat keamanan terhadap para pengunjung rasa akan terus berlangsung. Jika situasi tidak terkendali dan membahayakan kemanusiaan, melalui otoritas yang dimilikinya, PBB bisa saja mengambil sikap tegas terhadap rezim junta militer Myanmar karena dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Sanksi tegas bisa saja dibuat dengan memberi hukuman (melalui *International Criminal Court/ICC*) kepada para oknum junta militer yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM berat. PBB, khususnya Dewan Keamanan, bisa menjadi tumpuan harapan untuk mendapatkan pernyataan sekaligus tindakan yang lebih kuat dalam mengatasi krisis politik yang terjadi di Myanmar.

### **Penutup**

Demokrasi merupakan salah satu fokus pembangunan

terpenting bagi komunitas ASEAN sebagaimana disebut dalam Piagam ASEAN. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang bertujuan memperkuat demokrasi dan melindungi HAM. Myanmar, khususnya Militer (Tatmadaw) harus membuka diri pada proses demokrasi tersebut, tetapi sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Intervensi ASEAN pun sangat terbatas. Namun, jika memerhatikan pilar komunitas politik dan keamanan ASEAN, maka pengembangan kehidupan demokrasi dan perlindungan HAM di Myanmar harus terus didorong oleh ASEAN untuk bisa hadir secara nyata di Myanmar. Alternatif solusi yang juga bisa dilakukan adalah dengan melibatkan PBB, karena badan dunia tersebut memiliki perangkat dan otoritas yang kuat untuk menekan rezim junta militer jika dianggap tidak kooperatif dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di Myanmar.

### **Referensi**

- “Damar Untuk Myanmar”, *Kompas*, 15 Maret 2021, hal. 4.
- “Dunia Kecam Kekerasan di Myanmar”, *Republika*, 22 Maret 2021, hal. 4.
- “Empat Skenario Mengatasi Krisis Myanmar”, *Kompas*, 10 Maret, hal. 7.
- “Hari Paling Berdarah Pecah di Myanmar”, *Republika*, 16 Maret 2021, hal. 1.
- “Pemerintah Sipil Myanmar Melawan”, *Republika*, 15 Maret 2021, hal. 1.
- “Will Indonesia’s Diplomacy Solve Myanmar Crisis”, <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/02/25/will->

indonesias-diplomacy-solve-myanmar-crisis.html, diakses 15 Maret 2021.

“Uni Eropa Beri Sanksi 11 Petinggi Militer Myanmar”, *cnbcindonesia.com.*, 23 Maret 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210323095608-8-232103/uni-eropa-beri-sanksi-11-petinggi-militer-myanmar>, diakses 24 Maret 2021.

“231 Orang telah Tewas Dibunuh Junta Militer dalam Aksi Protes Anti-Kudeta Myanmar”, *Kompas.com.*, 20 Maret 2021, <https://www.kompas.com/global/>



Sita Hidriyah  
[sita.hidriyah@dpr.go.id](mailto:sita.hidriyah@dpr.go.id)

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.